

ANALISIS PENGGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA DI DAERAH 3T

Dokman Marulitua Situmorang¹⁾, Veneranda Rini Hapsari²⁾, Oktavia Marpaung³⁾

¹Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan, Tawangmangu, ²Institut Shanti Bhuana, Bengkulu, ³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta, Jakarta

¹dokman@bukitpengharapan.ac.id, ²rini@shantibhuana.ac.id, ³Oktavia.jykt@gmail.com

Abstrack

Berdasarkan observasi awal, beberapa permasalahan atau kesulitan dialami oleh para pengelola desa dalam melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan di Kabupaten Bengkulu. Ada juga kendala dan kesulitan di lapangan: Kurangnya pelatihan untuk aplikasi tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, menu di aplikasi berubah setiap tahun. Maka dari permasalahan diatas maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk mencari solusi dan cara pengelolaan dan pelaporan keuangan desa untuk daerah yang berada di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala penggunaan aplikasi Siskeudes. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Hasil penelitian bahwa desa dan panitia keuangan sangat berhati-hati dalam pelaporan dan pihak dari kantor pemerintah desa selalu melakukan monitoring dan monitoring, transparansi penggunaan dana desa sudah mulai diterapkan di Kabupaten Bengkulu, kita bisa lihat publikasi penggunaan dana desa dengan spanduk. Faktor jarak dari pusat pemerintahan desa menjadi salah satu kendala, kurangnya keahlian dalam memberikan pelatihan kepada desa Kaur, faktor infrastruktur jalan yang buruk menjadi kendala utama dalam berkoordinasi dengan kantor pemerintah desa, dan ketersediaan sinyal telepon merupakan salah satu kendala.

Kata kunci: Siskeudes, Dana Desa, Kualitatif

Abstract

Based on initial observations, several problems or difficulties were experienced by the village managers in carrying out financial management and reporting in Bengkulu Regency. There are also problems and difficulties in the field: Lack of training for applications does not suit the needs in the field, the menu in the application changes every year. So from the above problems, it is necessary to do in-depth research to find solutions and ways of managing and reporting village finances for areas located in the Frontier, Outermost and Disadvantaged areas. The purpose of this study was to find the constraints of using the Siskeudes application. This type of research is a case study. The results of the study are that the village and the finance committee are very careful in reporting and the parties from the village government office are always monitoring and monitoring, transparency of the use of village funds has begun to be implemented in Bengkulu Regency, we can see the publication of the use of village funds with banners. The distance factor from the very centre of the village administration is one of the obstacles, the lack of expertise in providing training to the Kaur village, the poor road infrastructure factor is a major obstacle in coordinating with the village government office, and the availability of telephone signals is one obstacle.

Keywords: Siskeudes, Village Fund, Qualitative

1. Pendahuluan

Desa adalah suatu daerah yang paling kecil diantara tingkatan susunan suatu negara, berbeda dengan kota desa terdiri dari beberapa aspek-aspek kecil kumpulan masyarakat yang mendukung berkembangnya suatu pemerintahan negara. Pada saat perkembangan daerah di mulai desa-desa sudah di berikan kekuasaan untuk mengelola menjadi mandiri dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pemerintahan untuk pembangunan desa yang lebih baik. Setiap desa diberikan kebebasan dalam meyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang nantinya dibuat oleh pemerintah desa dan menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai pedoman menyusun anggaran pada tahun selanjutnya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melihat dari berbagai fakta dan problematika diatas maka pemerintah mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aplikasi sistem keuangan desa ini dikembangkan juga salah satunya untuk pengelolaan dana desa agar dapat mempermudah pelaporan keuangan menjadi lebih transparan serta akuntabilitas.

Anggaran desa yang didistribusikan dari pusat akhir-akhir ini banyak diselewengkan karena kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengelola anggaran. Sehingga anggaran yang selama ini diharapkan dapat digunakan untuk memajukan desa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Hal demikian tentunya sudah lazim di negeri ini, sehingga tindakan-tindakan yang menyimpang tersebut perlu diwaspadai dan diantisipasi. Sebab perbuatan ini akan merugikan dan juga menghambat kemajuan dan juga berefek pada desa itu sendiri. Bentuk penyelewengan ini sangat bertolak belakang dari tujuan alokasi dana desa itu sendiri sehingga dengan adanya penyimpangan ini tentunya akan diberikan sanksi dan hukuman sesuai dengan Undang-undang yang berlaku kepada para oknum penyalahgunaan anggaran tersebut, sebab hal ini merupakan praktik korupsi dalam sekup kecil yang akan berimbas pada masa depan bangsa. Salah satu sekup kecil yang mendapat imbas dengan adanya praktik-praktik korupsi yaitu desa.

Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di sebelah utara Provinsi Kalimantan Barat. Secara administratif, batas-batas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

- Utara : Serawak-Malaysia Timur
- Selatan : Kabupaten Pontianak
- Barat : Laut Natuna dan Kota Singkawang
- Timur : Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak

Tabel 1.2 Desa Tertinggal di Kabupaten Bengkayang Tahun 2016

No	Nama Desa	Status Desa
1.	Bhakti Mulya	Sangat Tertinggal
2.	Rodaya	Sangat Tertinggal
3.	Semangat	Tertinggal
4.	Sidai	Sangat Tertinggal
5.	Suka Jaya	Sangat Tertinggal
6.	Kinande	Sangat Tertinggal
7.	Lembah Bawang	Sangat Tertinggal
8.	Godang Damar	Sangat Tertinggal
9.	Seren Selimbau	Sangat Tertinggal
10.	Nek Ginep	Sangat Tertinggal
11.	Beringin Baru	Tertinggal
12.	Gerantung	Tertinggal
13.	Babane	Tertinggal
14.	Bukit Serayan	Sangat Tertinggal
15.	Siding	Sangat Tertinggal
16.	Suka Bangun	Sangat Tertinggal
17.	Sungai Pangkalan Ii	Tertinggal
18.	Sungai Jaga B	Tertinggal
19.	Kelayu	Sangat Tertinggal
20.	Nangka	Sangat Tertinggal
21.	Temia Sio	Sangat Tertinggal
22.	Bana	Sangat Tertinggal
23.	Benteng	Sangat Tertinggal

Sumber : kemendesa. 2019

Dari tabel 1.1 ada 23 desa yang statusnya tertinggal dan sangat tertinggal di Kabupaten Bengkayang, maka potensi untuk pengembangan BUMDes sangatlah besar ditambah potensi alam dan budaya di Kabupaten Bengkayang sangatlah besar. Berdasarkan Sumber dari Badan Pusat Statistik kabupaten Bengkayang jumlah desa yang ada di kabupaten Bengkayang sebanyak 122 desa.

Tabel 1.2 Jumlah Dana Desa Kabupaten Bengkayang

2015	2016	2017	2018
Rp. 3.788.893.000	Rp. 75.781.481.000	Rp. 96.735.761.000	Rp. 92.347.847.000

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

Dari tabel 1.2 dapat kita lihat pertumbuhan dana desa dari tahun 2015 sampai 2018 di kabupaten Bengkayang dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Maka dana yang besar ini jika tidak dikelola dan dikontrol dengan baik maka akan beresiko di salah gunakan oleh pihak-pihak tertentu. Maka dalam hal ini pemerintah gencar menerapkan system keuangan yang baik dan terintegrasi dengan kementerian desa tertinggal. Sehingga keluarlah siskeudes.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan

Desa, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, telah menandatangani Nota kesepahaman Nomor 9001627115J dan MOU-16/I(D412015, tanggal 6 November 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Siskeudes telah berhasil diterapkan penuh di sekitar 60 persen dari 67.000 desa yang sejauh ini telah mengimplementasikannya. Desa-desa sisanya telah mulai menggunakan Siskeudes untuk membuat anggaran sejauh ini. Di Papua dan Kalimantan Utara, kurang dari 30 persen desa telah menggunakan aplikasi tersebut akibat lokasi yang terpencil, kurangnya pengawasan, akses listrik dan internet yang terbatas.

Berdasarkan observasi di awal, ditemukan beberapa masalah atau kesulitan yang di alami oleh pihak-pihak pengelola desa dalam melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan di daerah Kabupaten Bengkayang. Ada pun masalah dan kesulitan yang ada di lapangan adalah.

1. Kurangnya pelatihan untuk aplikasi
2. Tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
3. Menu di dalam ampikasi setiap tahunnya berubah-ubah.

Maka dari masalah di atas perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk menemukan solusi dan cara pengelolaan dan pelaporan keuangan desa bagi daerah-daerah yang letaknya ada di kawasan daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal. Apakah permasalahan itu dikarenakan masalah infrastruktur umum atau kapasitas dari bagian keuangannya.

1. Untuk Menemukan Dampak yang terjadi dari penggunaan aplikasi siskeudes terhadap pelaporan keuangan desa
2. Untuk Menemukan Faktor-Faktor Kendala dari pemakaian Aplikasi Siskeudes

2. Landasan Teori

Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal

Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) adalah daerah yang merupakan letak dan posisinya ada di sekitaran perbatasan antara Negara Indonesia dengan Negara lain atau tetangga, yang kondisi daerahnya kurang infrastruktur baik itu umum, kesehatan dan pendidikan. Daerah 3 T sangat banyak di Negara kita, diantaranya kawasan perbatasan Kalimantan dengan Negara Malaysia, Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, Papua dengan Papua Nugini.

Pemerintah sudah mulai memperhatikan daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal dengan melakukan pemetaan terhadap kawasan yang di nilai begitu perlu perhatian untuk mengurangi ketimpangan pembangunan yang terjadi di

daerah tersebut. Hal itu dapat kita lihat bahwa pemerintah sudah fokus untuk melakukan pembangunan perbatasan di beberapa daerah. Contohnya Entikong, Aruk (Kalimantan) dan banyak lagi.

Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal sangat perlu di perhatikan pembangunannya, karena dari situlah wajah atau jendela dari Negara kita untuk dapat dilihat oleh Negara lain atau Negara tetangga. Daerah ini haruslah di perhatikan dengan baik dan konsisten agar pembangunannya tidak salah dan jauh dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari pembangunan yang dilakukan oleh daerah tersebut.

Siskeudes

Menurut *Localsolutionstopoverty*, Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan desa yang disediakan oleh Pemerintah secara gratis. Pemerintah kabupaten/kota juga dapat menggunakan Siskeudes untuk mengompilasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Laporan Realisasi APBDes semua desa.

Tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang-undang (Sulina. at.al 2017)

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian adalah Penelitian Kasus (*Case Study*), menurut Maxfield dalam Sinulingga 2011: 27 bahwa Penelitian kasus adalah suatu jenis penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu frase spesifik dari keseluruhan personalitas. Dan metode penelitian yang dipakai adalah Metode kualitatif, menurut Sugiyono 2010: 8. Metode Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasin (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang. Pada pendekatan ini , peneliti membuat suatu gambaran kompleks, laporan terperinci, dan melakukan studi pada situasi yang dialami. Sedarmayanti dan Syarifuddin (2011:33) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan dalam pencarian fakta status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat.

Menurut Sinulingga (2011 : 165) Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara mencari/mengali secara langsung dari sumbernya oleh peneliti bersangkutan. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain sehingga tidak perlu lagi digali/dicari oleh peneliti bersangkutan. Fokus penelitian hanya berfokus pada penggunaan aplikasi siskeudes pada desa-desa yang ada di Kabupaten Bengkayang. Sumber data berasal dari data primer dan

sekunder. Sedangkan untuk teknik penelitian di lakukan dengan menggunakan sebaran kuesioner dan wawancara yang di lakukan oleh peneliti kepada pihak-pihak bagian keuangan desa. Serta beberapa sumber refrensi artikel-artikel penelitian sebelumnya. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif

4. Hasil Dan Pembahasan

Implementasi Siskeudes di Kabupaten Bengkayang

Penggunaan Aplikasi Siskeudes sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 26 ayat (4) huruf f menyatakan bahwa Kepala Desa (Kades) dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Pemerintah Kabupaten Bengkayang, mulai menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sejak tahun 2016. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bengkayang, sudah menggunakan Siskeudes di seluruh Desa yang ada atau pada 122 Desa.

Dampak yang terjadi dari penggunaan aplikasi siskeudes terhadap pelaporan keuangan desa

Berdasarkan penelusuran peneliti dari beberasap Kaur Keuangan desa yang tersebar dari beberapa desa, maka penggunaan siskeudes hanya berupa prinsip Proses penginputan dalam sistem keuangan desa (Siskeudes) dilakukan sekali sesuai dengan transaksi yang ada dan dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaannya, sebelum menginput data ke dalam aplikasi siskeudes, desa harus menetapkan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang telah disesuaikan sebelumnya dengan yang tertera dalam sistem. RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang akan diinput tersebut merupakan rancangan yang akan digunakan untuk tahun berikutnya.

Menurut pendapat bagian Kaur Keuangan mengatakan bahwa dalam proses pelaksanaan dari aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) ini harus disesuaikan dulu dengan apa yang ada pada sistem. Jika RAB tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada dalam sistem, maka sistem tidak dapat menginput data. Tentunya hal ini juga dapat membantu para pegawai dalam bekerja, dimana pegawai akan dituntut untuk bekerja dengan aturan yang telah ditentukan sehingga hasil kerjanya juga akan semakin baik. Selain RAB terdapat beberapa dokumen yang diinput dalam sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu dokumen penatausahaan, bukti penerimaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Setoran Pajak (SSP), laporan penganggaran (Perdes APBDesa, APBDesa per sumber dana), serta laporan penatausahaan (Buku kas umum, Buku bank, Buku pajak, Buku Pembantu, dan Register).

Laporan-laporan yang akan diinput ke sistem, sebelumnya akan dibuat oleh pegawai yang bertugas yang telah dibagi ke bidang masing-masing. Setelah pegawai desa membuat rancangan laporan yang sesuai dan telah mendapat persetujuan selanjutnya akan diberikan kepada operator untuk diinput ke sistem. Pernyataan diatas dapat diperkuat juga dari hasil observasi yang diperoleh di lokasi penelitian.

Adapun prosedur penggunaan dari aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu sebagai berikut:

1. Log in ke sistem menggunakan user ID dan password yang dimiliki Desa Kaba-kaba.
2. Setelah berhasil masuk ke sistem, lalu untuk memasukan data pilih Data Entri, kemudian pilih menu yang tertera. Dalam data entri terdapat 4 menu yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pembukuan.
3. Menu Perencanaan. Perencanaan Siskeudes digunakan untuk mengentri data perencanaan desa mulai dari Renstra Desa, RPJMDesa dan RKPDesa. Perencanaan Siskeudes diakses dari menu Data Entri – Perencanaan – Renstra Desa/ RPJMDesa seperti tampak sebagai berikut:
 - a. Menu Renstra Desa digunakan untuk memasukkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Desa yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMDesa.
 - b. Menu RPJM Desa digunakan untuk memasukkan data RPJM dan RKP Pemerintah Desa. Termasuk dalam data yang dientri adalah pagu indikatif setiap kegiatan pada setiap tahun RKPDesa.
4. Menu Penganggaran. Penganggaran digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penginputan data agar dimulai secara berturut sesuai menu yang tersedia dalam aplikasi. Dalam menu penganggaran terdapat 2 pilihan yaitu Isian Data Anggaran dan Posting APBDesa seperti tampak sebagai berikut:
 - a. Isian Data Anggaran terdiri dari menu data umum desa, menu kegiatan, menu pendapatan, menu belanja, menu pembiayaan, dan menu pembiayaan 2.
 - b. Posting APBDesa. Apabila proses input data anggaran telah selesai dan APBDes telah selesai dievaluasi maka posting APBDes dapat dilakukan. Posting ini dilakukan oleh admin Kabupaten/Kota atau admin di Kecamatan.

Menu penatausahaan digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penginputan data agar dimulai secara berturut-turut sesuai dengan tanggal transaksi yang ada. Selain itu penatausahaan digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan desa, transaksi pengeluaran desa baik panjar maupun definitif, transaksi mutasi kas dan transaksi penyetoran pajak. Sedangkan menu ekspor dan impor data digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer yang lain. Menu penatausahaan dapat dilakukan dengan cara yaitu: Data Entri – Penatausahaan seperti tampak sebagai berikut:

Faktor-Faktor Kendala dari pemakaian Aplikasi Siskeudes

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengadaan tenaga kerja merupakan langkah pertama dan yang mencerminkan berhasil tidaknya suatu perusahaan mencapai tujuannya. Menurut Hasibuan (2007: 27) menyatakan bahwa pengadaan

adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien untuk membantu tercapainya tujuan perusahaan.

Aplikasi sistem keuangan desa merupakan salah satu bentuk inovasi sistem pelaporan keuangan desa yang mengedepankan aksesibilitas, serta efektif dan efisien waktu. Aplikasi ini dikembangkan oleh BPKP agar desa-desa di seluruh Indonesia mampu menciptakan laporan keuangan yang akuntabel dan mengurangi terjadinya korupsi yang kerap dilakukan oleh aparat desa karena kurangnya kontrol dari pusat. Adanya penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) tersebut tentunya memberikan kelebihan maupun kelemahan bagi penggunaannya.

Kelebihan dari sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu: (1) sesuai peraturan, (2) memudahkan tata kelola keuangan desa, (3) kemudahan penggunaan aplikasi, (4) dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (Built-in Internal Control), (5) didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi (bpkp.go.id). Berdasarkan teori di atas hal tersebut sejalan dengan keadaan di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bengkayang, dimana kelebihan dari adanya sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu dapat menciptakan laporan keuangan yang lebih akurat, hal ini karena dalam sistem dapat mendeteksi jika terjadi suatu kesalahan. Sehingga para pegawai tentu dapat menciptakan suatu laporan keuangan yang tepat dan akurat.

Selain kelebihan dari sistem keuangan desa (Siskeudes), terdapat pula kelemahan dari sistem keuangan desa (Siskeudes) tersebut. Kelemahan sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu sulitnya memahami penggunaan aplikasi ini karena aplikasi yang masih baru diterapkan sehingga para pegawai sulit untuk mengaplikasikannya. Selain itu kurangnya pelatihan penggunaan sistem keuangan desa (Siskeudes) yang diberikan bagi para pegawai. Pelatihan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) hanya diberikan bagi operator yang bertugas sehingga para pegawai lainnya tidak memahami aplikasi tersebut dengan baik.

Disamping kelebihan dan kelemahan tersebut, adanya sistem yang baru diterapkan dalam suatu organisasi tentu menimbulkan kendala yang akan dihadapi oleh pegawai desa. Kendala tersebut antara lain: sistem keuangan desa (Siskeudes) masih terbilang rumit bagi sebagian pegawai, kurangnya pelatihan dan terjadinya eror pada sistem. Kendala yang dialami tersebut sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh informan. Untuk hambatannya belum sinkronnya di pemerintah daerah, pendamping desa sehingga bahasa yang satu bisa yang lain belum tentu bisa. Karena niki aplikasinya juga masih baru, jadi staf masih agak bingung dalam penggunaannya. Nah apalagi tuntutan untuk dapat menggunakan aplikasi niki dengan benar.

Dari kendala-kendala tersebut tentu akan menghambat kerja dari para pegawai desa. Agar dapat mengatasi masalah tersebut, para pegawai berusaha untuk melakukan koordinasi antar pegawai untuk Berdasarkan penelusuran peneliti dan wawancara, maka di dapatlah hasil bahwa kendala dalam penggunaan siskeudes ini ada pada update.

Standart Akuntansi Keuangan dan Standart Akuntansi Pemerintah merupakan pedoman perusahaan, organisasi usaha, dan pemerintahan dalam melaporkan keuangan dan pencatatan transaksi-transaksi keuangan pada kegiatan bisnis usaha tersebut. Maka di dalam setiap kegiatan dan organisasi usaha yang

dilakukan secara legal baik itu swasta dan negeri haruslah mengaju kepada kedua pedoman aturan tersebut.

5. Simpulan

Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) di beberapa Desa yang ada di Kabupaten Bengkayang memberikan kemudahan bagi para pegawai. Hal ini karena dalam sistem keuangan desa (Siskeudes) Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes), desa akan memiliki username dan password yang digunakan untuk log in/masuk ke dalam sistem. Ketika sudah masuk dalam sistem, akan terdapat beberapa menu pilihan. Untuk melakukan input, menu yang diakses atau dipilih yaitu menu data entri yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan serta pembukuan. Untuk penginputan data pada menu penganggaran dan penatausahaan harus disesuaikan dengan yang tertera pada sistem.

Tingkat sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Desa yang ada di Kabupaten Bengkayang masih terbilang rendah. Meskipun pendidikan dari pegawai Desa khususnya bagian Kaur Keuangan kurang memenuhi standar, tetapi dalam penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) di beberapa Desa di Kabupaten Bengkayang telah berjalan dengan lancar. Cara yang dilakukan untuk mengintegrasikan sumber daya manusia (SDM) yang rendah terhadap penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan secara teratur, melakukan koordinasi dengan para pendamping dan pelatih dari pusat, memberikan dukungan dan motivasi bagi para staf/pegawai dalam proses pembelajaran, menyediakan sarana dan prasarana yang akan digunakan guna meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

Manfaat dari adanya sistem keuangan desa (Siskeudes) cukup signifikan dirasakan bagi para pegawai desa di beberapa Desa yang ada di Kabupaten Bengkayang. Dengan diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) tersebut telah membantu kerja para pegawai, dimana pekerjaan yang dilakukan dapat lebih terencana dan terarah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu para pegawai dapat mengetahui kesalahan yang mereka lakukan dalam pelaporan keuangan.

Kelebihan dari sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu: (1) sesuai peraturan, (2) memudahkan tata kelola keuangan desa, (3) kemudahan penggunaan aplikasi, (4) dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (*Built-in Internal Control*), (5) didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi. Selain kelebihan dari sistem keuangan desa (Siskeudes), terdapat pula kelemahannya yaitu sulitnya memahami penggunaan aplikasi ini karena aplikasi yang masih baru diterapkan sehingga para pegawai sulit untuk mengaplikasikannya. Selain itu kurangnya pelatihan penggunaan sistem keuangan desa (Siskeudes) yang diberikan bagi para pegawai. Dari kelemahan tersebut akan menimbulkan kendala dalam penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes), yaitu: sistem keuangan desa (Siskeudes) masih terbilang rumit bagi sebagian pegawai, kurangnya pelatihan dan terjadinya eror pada sistem

Daftar Pustaka

- Hasibuan, Malayu. S.P. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa <https://localsolutionstopoverty.org/id/faq/indonesia-strengthening-village-financial-systems-faqs.html>
- Sulina, T, A G. Wahyunni, A, M. dan Kurniawan, S, P. 2017. Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). E Journal S1 Akuntansi Universitas Ganesha. Vol:8 No:2 Tahun 2017.
- Sedarmayanti, Syarfudin. 2011. *Metodologi Penelitian*. Mandar Maju. Bandung.
- Sinulingga, S. 2011. Metode Penelitian. USU Press. Medan.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.